



ISSN 2685-483X
Volume 3, Issue 1, Januari-Juni 2021
Halaman 43-52



Populisme dan Intoleransi dalam Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Digital Indonesia

Ratu Eka Shaira
SMAN 1 Ciamis

Tresna Dwi Nurida
SMAN 1 Ciamis

Rakhmat Hidayat
Universitas Negeri Jakarta

Kata Kunci	Abstrak
Populisme	<p>Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan populisme sebagai <i>'thin ideology'</i> dan taktik politik yang menjadi salah satu pengaruh terhadap terjadinya intoleransi di Indonesia. Hal ini didorong oleh adanya disrupsi teknologi di abad ke-21 yang semakin masif, khususnya dalam media komunikasi berupa media sosial yang berujung pada efektifnya pengumpulan massa untuk membuat kubu politik dan menciptakan sekat-sekat sosial diantara masyarakat digital multikultural Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahaya populisme bagi masyarakat digital serta menawarkan solusi untuk menekan ancaman dari populisme itu sendiri. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, dengan cara menganalisis data-data sekunder seperti jurnal ilmiah, artikel dan kanal berita elektronik serta komponen lain yang mendukung penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa populisme memiliki kaitan yang sangat erat dengan adanya intoleransi dalam masyarakat digital Indonesia. Dampak dari pengumpulan massa politik dimanfaatkan untuk membangun orasi citra 'pahlawan' yang peduli terhadap nasib rakyat disemati pesan-pesan berbau apokaliptik dan pesimistis yang merujuk kepada otoritas yang disebut elite melalui berita-berita hoax sebagai perantara. Karakteristik yang berupa populisme agama di Indonesia menjadi dominasi dalam kasus intoleransi serta isu radikalisme saat ini. Adapun solusi untuk mengurangi dampak buruk dominasi tersebut adalah meningkatkan literasi masyarakat digital, menerapkan strategi kebudayaan secara tepat sasaran, menegakkan kode etik jurnalistik, serta membangun sebuah regulasi yang jelas sesuai dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto.</p>
Intoleransi	
Masyarakat	
Digital	
Literasi	
Naskah Awal	29 April 2021
Review	15 Mei 2021
Revisi	25 Mei 2021
Naskah Diterima	1 Juni 2021
Publikasi	30 Juni 2021



ISSN 2685-483X

Volume 3, Issue 1, Januari-Juni 2021

Pages 43-52



Populism and Intolerance in The Socio-Cultural Dynamics of Indonesian Digital Society

Ratu Eka Shaira
SMAN 1 Ciamis

Tresna Dwi Nurida
SMAN 1 Ciamis

Rakhmat Hidayat
Universitas Negeri Jakarta

Keywords	Abstract
Populism Intolerance Society Digital Literacy	This study examines populism as a 'thin ideology' and political tactics that becomes one of the impact towards intolerance in Indonesia. It is encouraged by the existence of technological disruption in 21st century which is getting massive, especially in the media of communication such as social media that culminating towards the effectiveness of mass gathering for making a political camp and making social barriers among Indonesia's multicultural digital society. The purpose of this study is to find out the hazards of populism for society and offer solutions to push the threats of populism. The researcher using a descriptive-qualitative methods by analyzing the secondary data such as scientific journal, article and electronic news canal, also the other components that supports this study. The results of this study indicates that populism has a very closely related to the presence of intolerance in Indonesia's digital society. The effects of political mass gathering was utilized to build the 'hero' imagery that cares towards people's destiny, inserted by apocalyptic and pesimistic messages that refers to the authority called 'elites' through fake news as intermediary. Characteristic in the form of religion populism, becomes a domination in intolerance and radicalism cases nowadays. As for the solution to reduce bad effects of this domination, are increasing the digital society literacy, applying the cultural strategy appropriately, establishing the journalistic code of ethics, also ramping up the obvious regulations according to the legal effectiveness theory by Soerjono Soekanto.
Submission	29 April 2021
Review	15 Mei 2021
Revision	25 Mei 2021
Acceptance	1 Juni 2021
Publication	30 Juni 2021

Pengakuan

Tulisan ini pernah diikutsertakan dalam Lomba Festival Pendidikan yang diselenggarakan BEM Himpunan Mahasiswa Departemen Pendidikan Sosiologi FPIPS UPI Bandung pada tanggal 23 November 2020. Untuk kepentingan penulisan jurnal ini, penulis mengembangkannya dengan memberikan beberapa pendalaman analisa dan sumber referensi yang relevan.

Pendahuluan

Sejak abad ke-19, populisme menjadi sebuah perbincangan yang sudah tak asing lagi dalam dunia politik. Masuk abad ke-20, dimana populisme mulai mendominasi Amerika Latin dengan adanya beberapa gelombang. Gelombang pertama yang dipelopori oleh Peron dari Argentina tahun 1930 dengan populisme-ideologinya, kemudian muncul gelombang kedua tahun 1990 saat populisme dimanfaatkan keberadaannya oleh ideologi *neoliberalism* di Amerika Latin yang dipimpin oleh Fujimori (Peru), dan masuk abad ke-21 dimana populisme muncul kembali, digabungkan dengan isu-isu rasisme dan intoleransi melalui media sosial. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Partai Sayap Kanan Brazil yang dipimpin oleh Bolsonaro untuk meraih popularitas. Begitu pula di beberapa negara Eropa pada tahun 2018, ketika 8 negara di Uni Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Italia, Polandia, Hongaria, dan Slovakia) dipimpin oleh partai sayap kanan yang nasionalis dan *xenophobic*. Partai-partai dari negara tersebut juga telah memolarisasi medan politik di tiga negara utama Uni Eropa, yaitu Prancis dengan *National Front*, Italia dengan Lega Nord dan kekuatan hegemoni Partai Sayap Kanan Italia yang mengalahkan popularitas Silvio Berlusconi, serta Jerman dengan *Alternative für Deutschland*, melemahkan posisi Angela Merkel dan 'memaksa' *Christian Democratic Union* untuk memperbaharui koalisinya dengan *Social Democratic Party*, yang membuat Angela Merkel harus mempertimbangkan kembali kebijakan yang 'murah hati' terhadap imigran dan pengungsi (Traverso, 2019). Negara-negara tersebut memenangkan pemilihan umum dan menguasai pemerintahan dengan memanfaatkan isu imigran yang secara tidak langsung menggiring opini publik terhadap adanya *xenophobia* dalam beberapa tahun ini. Pernyataan seperti, "*Austria first!*", "*America First!*", dan "*We want our country back!*" merupakan contoh dari nativisme sebagai ciri populisme, karena sejatinya selain menarik masyarakat melalui janji kesejahteraan, para populis merupakan kumpulan dari orang-orang anti-pluralisme. Hal inilah yang menjadi akar dari adanya intoleransi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noam Gidson dan Bart Bonikowski, populisme dibagi menjadi tiga konseptual utama (Ritonga & Adela, 2020). Yang pertama sebagai ideologi. Sifat populisme yang bisa digabungkan dengan ideologi apapun yang ada di seluruh dunia, membuatnya dikenal sebagai '*thin ideology*', yaitu gagasan atau ide dari seorang populis yang dapat berkamufase dengan ideologi-ideologi yang lebih besar (Muri, 2017). Seperti yang terjadi pada tahun 1990an, saat Amerika Latin menggunakan ideologi *neoliberalism* sebagai hasil dari adaptasi '*Washington Consensus*'. Namun, hal tersebut hanya menghasilkan kekacauan di berbagai negara Amerika Latin, serta membuat tokoh-tokoh saat itu harus kehilangan jabatannya. Sebagai contoh, Fernando Collor de Melo yang diadili di Brazil, sedangkan Menem kehilangan kekuasaannya di Argentina. Alberto Fujimori yang harus mengakhiri jabatannya dengan meninggalkan Peru ke Jepang, dan Perez yang digeser setelah terjadi pertumpahan darah di Jalanan Caracas (Lopes, 2017). Yang kedua adalah sebagai strategi politik, yaitu populisme digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kedudukan menggunakan taktik politik seperti pemilihan kebijakan, organisasi politik, bentuk mobilisasi. Kemudian yang ketiga adalah populisme sebagai gaya diskursi, yaitu pemanfaatan populisme untuk menarik massa politik melalui retorika. Variasi ini menggunakan istilah 'kita' dan 'mereka' untuk menciptakan dua polarisasi kubu, yakni masyarakat yang tertindas dan para elite yang berkuasa. Mereka menggunakan media yang mudah diakses oleh semua orang, agar retorika yang diciptakan bisa tersampaikan dengan baik dan efektif, seperti melalui media sosial. Hal ini secara eksplisit menciptakan *in-group* yang menentang elite otoritas, kemudian menciptakan *out-group* terhadap mereka. Pola ini memiliki kemiripan dengan populisme

agama yang ada di Indonesia, dimana para pengikut populis menciptakan *labelling* yang dilontarkan melalui konten-konten di media sosial ataupun komentar warganet, yang secara tidak langsung mengakibatkan intoleransi dalam masyarakat plural.

Abad ke-21 merupakan zaman dimana batas dunia sudah tak begitu berarti, khususnya dalam berkomunikasi satu sama lain antar komunikan di seluruh penjuru dunia. Internet merupakan salah satu media untuk melakukan kegiatan diatas. Setiap gerakan sosial yang disebarkan dengan memanfaatkan unsur teknologi, salah satunya adalah media sosial dapat dengan mudah mendistribusikan informasi dan memobilisasi gerakan dengan berkecepatan tinggi (Zahara, Wildan, & Komariah, 2020). Sementara itu, di Indonesia, internet telah menjadi wadah dalam kebebasan berekspresi, seperti dimanfaatkan untuk kegiatan berpolitik. Melalui internet, semua orang memiliki hak untuk berpendapat, bahkan berserikat dan berkelompok sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 28, 28 E ayat (3), serta memiliki hak untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, sesuai isi Pasal 28 F yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Sejak masuknya internet ke Indonesia, kampanye yang dilakukan untuk merangkul masyarakat sebanyak-banyaknya semakin mudah untuk dilakukan. Melalui kampanye inilah, masyarakat sangat diperkenankan untuk berekspresi, mengkritik, dan mendukung salah satu kandidat, walaupun masih banyak yang belum memahami bahwa kebebasan berekspresi menurut konstitusi kita bukanlah berarti bebas sebeb-as-bebasnya. Karena, "Kebebasan tanpa pembatasan bukanlah kebebasan menurut hukum". Konstitusi kita tepatnya pada pasal 28 J ayat (1) dan (2) mengakui adanya pembatasan kebebasan dengan berprinsip kepada pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Namun, hal tersebut seperti tak menjadi fokus penting di masyarakat, khususnya masyarakat digital yang akibatnya banyak dari mereka yang tak peduli dengan hukum, dan tetap melanggar hukum yang ada. Meskipun demikian, hal diatas tidak membuat masyarakat takut menggunakan internet, bahkan justru penggunaannya bertambah dengan sangat cepat. Tulisan ini mengkaji diskursus populisme secara teoritik dan mengantarkannya dalam praktik populisme di Indonesia. Populisme menjadi *'thin ideology'* dan taktik politik yang menjadi salah satu pengaruh terhadap terjadinya intoleransi di Indonesia.

Metode

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif dalam melakukan analisis dan menghasilkan tulisan. Peneliti menganalisis berbagai data sekunder, yang terdiri dari jurnal ilmiah, artikel, kanal berita elektronik, serta komponen lainnya. Data yang didapat dari sumber-sumber tersebut diuraikan menjadi sebuah studi kasus mengenai fenomena populisme selama beberapa periode terakhir. Studi kasus yang disusun mengandung peristiwa serta data-data yang kontekstual dengan situasi populisme dan intoleransi yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya melalui dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia di abad ke-21.

Populisme dan intoleransi yang sedang terjadi di Indonesia, merupakan sebuah kausalitas yang nyata terjadi dalam masyarakat digital saat ini. Masifnya penggunaan media sosial di berbagai kalangan, tanpa disadari memberikan ruang yang kompleks bagi para pengguna. Kompleksitas inilah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperebutkan kedudukan di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan metode deskriptif-kualitatif untuk menelusuri akar permasalahan yang terjadi dalam topik ini.

Penelitian dimulai dengan mengamati data-data dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan motivasi pembentukan populisme, kondisi populisme di beberapa negara selama beberapa dekade terakhir, serta pengaruhnya bagi masyarakat modern. Informasi tersebut digunakan untuk menganalisis karakteristik taktik populisme yang digunakan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, faktor populisme dalam politik identitas, serta mengukur dampak populisme terhadap intoleransi yang muncul di masyarakat digital saat ini. Pengembangan studi kasus dalam penelitian ini, menjadi kunci utama untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan baru yang faktual.

Hasil dan Pembahasan

Konseptualisasi dan Pola Populisme di Indonesia

Populisme memiliki beberapa definisi yang berkaitan dengan ruang lingkup politik. Menurut Lee, populisme dapat didefinisikan sebagai sebuah ideologi yang ‘tipis’ dalam melihat masyarakat terbagi menjadi dua polarisasi homogen dan antagonistik, yakni orang-orang baik yang berhadapan dengan elite korup (Habbodin, 2019). Secara sederhana populisme dimaknai sebagai suara retorika politik, yang menganggap keutamaan dan keabsahan politik terletak pada rakyat (Abercrombie & Longhurst, 1998). Para populis sering kali menempatkan diri sebagai pihak yang tertindas oleh liberalis atau pemikir moderat, karena pada dasarnya populisme memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, selalu berusaha untuk mewakili masyarakat yang termarjinalkan. Mereka mencoba meyakinkan massa bahwa mereka sedang berada dibawah tekanan para elite yang menindas sehingga rakyat sengsara, yang akhirnya massa akan mendukung para populis. *Kedua*, penganut populis cenderung selalu berpesan apokaliptik (pemikiran yang berkaitan dengan kehancuran), yaitu mengungkapkan ekspresi yang bersifat pesimis seperti, “Negara kita bangkrut, Indonesia akan bubar!” (Ritonga & Adela, 2020). Frasa tersebut sering digunakan untuk memunculkan persepsi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat digital Indonesia bahwa mereka perlu melakukan perubahan dengan cara menjadi bagian dari kubu tersebut untuk mencegah kehancuran terjadi.

Lantas, apa pengaruhnya bagi masyarakat? Jika kita kembali pada situasi politik saat pemilihan presiden tahun 2019, banyak sekali hal-hal menyimpang akibat populisme yang saat itu tengah menjadi tren politik. Populisme itu sendiri tercipta dari adanya permainan politik identitas yang bergerak dalam bentuk religi (agama). Hal tersebut diawali dengan adanya skandal penistaan salah satu agama oleh seorang tokoh politik bernama Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2016. Hal itu memicu amarah masyarakat dan akhirnya mereka bersatu untuk melawan dalam sebuah aksi besar-besaran dan menuntut agar kasus ini diusut hingga selesai. Tahun-tahun berikutnya, skandal ini masih terus menjadi perbincangan, khususnya di masyarakat digital dimana berita-berita palsu mengenai hal-hal berbau intoleransi semakin meningkat. Hal tersebut akhirnya mencapai klimaks pada tahun 2019, saat Pemilihan Presiden 2019-2024 dilaksanakan.

Populisme di Indonesia cenderung memanfaatkan identitas masyarakat, yang dipadukan dengan sentimen politik untuk memperoleh dukungan. Hal ini jelas terlihat dalam Pemilihan Presiden tahun 2019, ketika salah satu kandidat calon presiden dan wakil presiden memanfaatkan momentum penting ini untuk mencari dan memperoleh dukungan politis. Taktik ini dapat disaksikan ketika Kandidat Pasangan Calon No. 2 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno), ketika mereka mencari dukungan dari para ulama untuk sekaligus menghimpun massa pengikutnya, yang akhirnya menghasilkan *Ijtima Ulama I-III*. Jika diuraikan, *Ijtima Ulama I* membahas tentang dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai Kandidat Calon Presiden RI 2019-2024 serta merekomendasikan cawapres untuk Prabowo agar menjadi calon bernuansa nasionalis-religius, *Ijtima Ulama II* meminta agar Prabowo agar menjamin kepulangan Habib Rizieq dari Arab Saudi, serta *Ijtima Ulama III* membahas mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang terstruktur, sistematis, dan masif (Nurita & Amirullah, 2019). Acara tersebut merupakan salah satu langkah perwujudan populisme sebagai alat polarisasi masyarakat dalam satu kubu. Kubu tersebut mendampingi Kandidat Pasangan Calon No. 2 dan akan menjadi ‘tameng’ yang sangat signifikan untuk melindungi citra mereka sebagai ‘pemimpin orang mukmin’. Situasi ini secara terus-menerus dijadikan sebuah pembenaran yang keliru oleh para pendukung, bahwa siapapun yang mendukung kandidat ini adalah mereka yang membela Islam, begitupun sebaliknya. Selain itu, kondisi ini dimanfaatkan oleh para tokoh yang berpengaruh dalam kubu mereka untuk mengungkapkan orasi-orasi yang bersifat mengajak dan meyakinkan para pengikut kubu bahwa mereka telah memilih jalan yang benar untuk bisa menjatuhkan pemerintah yang penuh dengan elite yang menyengsarakan rakyat, yang terkadang menggunakan lebih dari sekadar retorika, yaitu berita-berita provokatif bahkan *fake news* di dunia maya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan konten hoax pada bulan Januari – April 2019. Dalam sebuah berita berjudul *Temuan Kominfo : Hoax Paling Banyak Beredar di April 2019*, tepat pada Januari 2019, konten hoax mengalami peningkatan sangat signifikan hingga 175 kasus, kemudian meningkat kembali menjadi dua kali lipat dari sebelumnya, yaitu 353

kasus pada Februari 2019, dan Maret 2019 sebagai puncak penyebaran konten hoax dengan jumlah yang mencapai 453 kasus. Hal tersebut kembali terbaharui oleh pernyataan Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, yang menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah mengidentifikasi 486 hoax pada April 2019, yang mana jumlah tersebut merupakan yang terbanyak sejak Agustus 2018 (Setu, 2019). Hoax tersebut sebagian besar mengandung isu sosial politik serta agama, yang merupakan bagian dari permainan politik identitas, sehingga munculah populisme yang dimaksud pada masyarakat digital Indonesia. Permainan politik identitas tersebut bahkan berlanjut hingga 2020 ini, dimana partai-partai oposisi masih menggunakan cara yang tidak jauh berbeda dari 2019, yaitu mengangkat isu agama untuk membuat citra partai menawan di mata massa. Kondisi ini menciptakan *gap* antara kubu yang satu dan yang lainnya, karena *labelling* yang diberikan oleh tiap kubu untuk saling melawan dan menjatuhkan, memperebutkan pengaruh politik demi kedudukan yang tinggi, yang pada akhirnya menimbulkan intoleransi. Pola ini cenderung membentuk populisme agama, yang dipengaruhi unsur politik. Diksi-diksi yang diungkapkan tak jarang mengandung kekerasan teologis. Abdul Moqsith Ghazali, dalam sebuah berita bertajuk *Harus Dihapuskan, Kata 'Kafir' Mengandung Unsur "Kekerasan Teologis"*, menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan label diskriminatif tersebut untuk menggambarkan sebagian warga yang lain, baik yang Muslim maupun Non-Muslim (Ghazali, 2019). Hal ini merupakan salah satu strategi populisme agama, yang menjadi momok cukup besar dalam pengaruhnya terhadap kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Ditambah dengan fakta, bahwa pada abad ke-21 ini, semua hal dapat diakses secara cepat dan mudah, tanpa perlu biaya besar untuk bisa memanfaatkan fasilitas digital, khususnya komunikasi, seperti media sosial. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *We Are Social* yang bertajuk *'Global Digital Report 2020'* bahwa saat ini, sekitar 64% Penduduk Indonesia telah terkoneksi dengan jaringan internet. Jumlah pengguna internet Indonesia meningkat sekitar 17% atau 25 juta pengguna menjadi 174,5 juta dengan rata-rata waktu penggunaan 7 jam 59 menit per hari. Hal tersebut melebihi rata-rata global yang mencapai 6 jam 43 menit per harinya (Ludwianto & Fikrie, 2020). Oleh karena itu, internet merupakan sebuah opsi tempat untuk berpolitik, hampir setiap harinya, karena diprediksi akan merangkul lebih banyak massa untuk mendukung salah satu pihak, serta sebagai media untuk menyebarkan informasi dan retorika para populis, seperti melalui ceramah ataupun video singkat.

Munculnya Populisme di Indonesia

Mengapa populisme sangat mudah terjadi khususnya pada masyarakat digital Indonesia? Di era digital ini, masyarakat akan mengetahui segala macam bentuk informasi dari internet/dunia maya. Hal tersebut termasuk dengan berita-berita palsu yang mengandung unsur ujaran kebencian. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Central Connecticut State* tahun 2016, bahwa Indonesia berada pada tingkat kedua terbawah dari 61 negara dalam hal literasi (Andriani, 2020). Hal ini dimanfaatkan oleh segelintir orang dalam sebuah kubu untuk menarik masyarakat melalui berita – berita palsu yang mereka sebarkan, sehingga para populis itu akhirnya mendapatkan banyak pendukung dengan kondisi masyarakat yang terpecah-belah, intoleran, dan pesimistis. Ditambah lagi, situasi negara Indonesia yang rentan akan permasalahan sosial di berbagai bidang membuat masyarakat mencari sosok pemimpin yang tegas, ditakuti, dan 'menuruti' keinginan rakyat. Tipe populis inilah yang sering menjadi pelarian masyarakat.

Hal ini juga terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki sistem politik hampir sama dengan Indonesia, salah satunya adalah Brazil dengan Presidennya, Jair Bolsonaro. Bolsonaro memiliki metode yang tidak jauh berbeda, yaitu memanfaatkan kegundahan warganya dengan meyakinkan bahwa mereka sedang berada di ambang kesengsaraan. Hal tersebut berhasil mendulang dukungan bahkan dari para *swing voters*. Bahkan, Kubu Bolsonaro tak segan untuk menyebarkan berbagai informasi palsu mengenai kubu lawan, dan informasi yang berbau intoleran untuk menjatuhkannya (Hasan, 2018). Populisme dapat dengan mudah menciptakan intoleransi. Maraknya ujaran kebencian yang ada di media sosial ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap sikap intoleran di masyarakat. Ujaran kebencian mengkotak-kotakkan masyarakat yang menerima informasi tersebut dalam kubu-kubu tertentu. Hujatan dan ujaran kebencian bahkan merucut pada *labeling* istilah tertentu dalam media sosial (Herlina, 2018). Bahkan, Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kasus intoleransi.

Seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kasus intoleransi mencapai peningkatan dalam lima tahun terakhir dan menempati posisi keenam sebagai wilayah dengan tingkat intoleransi tertinggi dengan jumlah 37 kasus. Peringkat lima besar diduduki oleh Jawa Barat (162 kasus), DKI Jakarta (113 kasus), Jawa Timur (98 kasus), Jawa Tengah (66 kasus), dan Aceh (65 kasus). Kelima daerah ini juga menempati posisi teratas dengan urutan yang sama tingkat intoleransi dalam 12 tahun terakhir (Subarkah, 2020). Sebagian besar kasus intoleransi tersebut ditanggapi oleh kepentingan politik yang merupakan bagian dari populisme. Dinamika sosial budaya masyarakat digital Indonesia yang terjadi sekarang ini sangat bertentangan dengan karakter dan identitas bangsa Indonesia yang selalu menghargai berbagai perbedaan dalam masyarakat multikultural, sesuai dengan sila kedua dan ketiga Pancasila. Toleransi yang sudah sejak lama menjadi ciri khas Bangsa Indonesia, dapat tergerus dengan adanya populisme berkedok politik identitas. Oleh karena itu, dapat diperjelas bahwa dalam kasus ini, populisme hanya menjadi 'topeng' bagi para elite untuk meraih dukungan politik itu sendiri, dengan cara menciptakan suasana masyarakat yang terpecah-belah dan intoleran.

Mengapa populisme agama menjadi alat favorit untuk menyebarkan intoleransi dalam masyarakat digital Indonesia? Seperti yang pernah dikatakan Sularto, bahwa agama merupakan titik awal yang paling mudah meletup karena menjadi jati diri pengikut para pemeluknya, baik dari sisi kosakata missioner maupun dakwah, sebuah upaya yang dalam sejarah agama apapun pernah diwarnai dengan kekerasan senjata dalam memperjuangkannya (Wera, 2020). Hal ini karena agama merupakan identitas yang sudah melekat dalam diri manusia sejak lahir. Semakin intim kedekatan unsur tersebut dengan jati diri manusia, maka akan semakin sensitif untuk dibahas. Kemudian, kekuatan keyakinan manusia akan membentuk loyalitas terhadap golongannya sehingga mereka yang memiliki loyalitas sangat tinggi akan cenderung bersifat lebih radikal. Sifat radikalisme itulah yang dimanfaatkan dalam membentuk populisme di masyarakat digital Indonesia. Konten-konten mengenai radikalisme pun sudah cukup menjamur di media sosial, dari mulai berita asli hingga konten *hoax* yang hanya bersifat menjatuhkan agama lain dapat memengaruhi pola pikir sosial budaya masyarakat digital. Persoalan ini semakin memancing ketika dicampur dengan narasi-narasi yang memiliki nuansa politis yang membawa isu dan persoalan terkait suku, agama, dan ras yang menimbulkan tindak kekerasan baik secara verbal di media sosial maupun konfrontasi secara langsung ditengah masyarakat (Dewi & Triandika, 2020). Masyarakat akan dengan mudah percaya sehingga terhasut untuk menghilangkan toleransi, dengan doktrin yang mengatakan bahwa toleransi merupakan hal yang melanggar iman. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Indonesia adalah negara yang dapat dikatakan 'religius' jika kita melihat kembali pada sila pertama Pancasila. Hal ini adalah salah satu faktor mengapa populisme di Indonesia, khususnya populisme agama dapat dengan mudah menggerogoti identitas sosial budaya masyarakat digital Indonesia. Oleh karena itu, populisme merupakan salah satu taktik yang cukup berbahaya dalam kehidupan multikultural dan berdemokrasi, serta berdampak cukup besar bagi kedua hal tersebut.

Paling tidak bisa dirumuskan dua dampak praktik populisme, yaitu (1) populisme menimbulkan sekat dan golongan di masyarakat. Kaum populis yang cenderung memiliki tingkat *inferiority* yang tinggi akan bersifat antagonistis terhadap kaum diluar populis, dan berusaha mencari kawan sebanyak mungkin untuk melawan mereka dengan cara menyebarkan *hoax* berkedok agama/etnis yang akhirnya membuat masyarakat digital teradu domba hingga ke kehidupan nyata. Sebagai contoh kasus yang dilansir dari katadata.co.id, pada akhir tahun 2016, muncul isu 'serbuan' 10 juta Pekerja China di Indonesia. Isu spesifik soal tenaga kerja dari China sudah mengarah ke masalah politis. Menurut Dhakiri, kata serbuan, banjir, serangan, kepungan dan semacamnya yang jelas melebih-lebihkan dan membesar-besarkan, jelas terlihat sebagai *framing* politik (Arya, 2016). Masalah politis ini merupakan indikasi populisme yang menyerang pola pikir masyarakat yang mengarah pada nativisme yang berujung intoleransi. Rasisme sejak tahun 1998 terhadap etnis Tionghoa seolah belum hilang dari permukaan, sehingga masyarakat mengungkit kembali masalah tersebut dan akhirnya munculah intoleransi etnis di Indonesia. Permasalahan etnis Tionghoa memang menjadi topik yang cukup sensitif dikalangan masyarakat. Isu TKA dari Tiongkok telah beredar kuat sebagai serbuan kekuatan asing yang begitu massal untuk menguasai Indonesia (Lukmantoro, 2018). Kondisi ini menciptakan pembatas antar etnis, yang tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan

multikulturalisme yang ada di Indonesia.

Dampak kedua adalah ancaman bagi sistem demokrasi. Populisme dapat dipandang sebagai kritikan atas sistem demokrasi representatif yang gagal menciptakan keadilan sosial dan menjadi penyambung lidah rakyat yang diwakilinya (Madung, 2018). Namun, dalam hal ini, populisme malah menjadi sebuah sistem yang mengancam tatanan bernegara. Hal ini karena hak kebebasan berekspresi dalam demokrasi dimanfaatkan oleh para populis untuk mengungkapkan dan menawarkan kalimat-kalimat pesimistis berbau otoritarianisme yang ada dalam diri mereka, dan menyebarkan pengaruhnya lewat berbagai media, khususnya media digital, bahkan dengan cara menjatuhkan lawan.

Populisme dan Kapasitas Literasi

Perlu diakui, bahwa populisme tidak dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat digital saat ini. Informasi-informasi yang cepat beredar karena kemajuan teknologi di era globalisasi ini, membuat hal-hal seperti populisme tidak bisa tertahan. Hal ini juga bergantung kepada situasi politik dan sosial budaya suatu negara. Menurut Hardiman, fenomena ini adalah disrupsi dalam dunia politik yang sangat politis secara besar-besaran yang kemudian diintensifkan oleh teknologi digital secara masif menjadi suatu prahara (Wera, 2020). Jika masyarakat digital memiliki tingkat literasi yang tinggi serta kritis dalam menanggapi suatu kasus, populisme ini dapat dikendalikan. Dalam konteks itu, beberapa agenda penting dalam merespon isu dan praktik populisme yang masif di masyarakat antara lain. *Pertama*, meningkatkan kapasitas literasi masyarakat. Hal ini berlaku bagi semua pihak, khususnya generasi muda penerus bangsa. Dengan kemampuan literasi, kita dapat memilah informasi yang valid dan yang invalid serta mencegah berita hoax memasuki kehidupan kita. Masyarakat digital kita yang sering berselancar di media sosial perlu memiliki literasi yang mendalam, karena akan dipertemukan dengan berbagai berita hoax bermotifkan populisme. Kemampuan literasi, khususnya literasi membaca dapat ditingkatkan dengan cara sering mencari lebih dalam mengenai berita-berita yang ditemukan, mencari asal-usul serta sumber, dan selalu mengembangkan pola pikir terhadap berita tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan analisis atas suatu kejadian, agar masyarakat digital tak semata-mata mendapatkan informasi mengenai berita tersebut. *Kedua*, membumikan strategi kebudayaan secara tepat sasaran. Kita perlu memperhatikan kembali strategi kebudayaan yang telah disusun secara komprehensif tahun 2017, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan. Strategi kebudayaan yang dimaksud tercetus dalam UU No. 5 Tahun 2017, yang mengatur tentang Pemajuan Kebudayaan. Diperlukan adanya *concerted effort* dimana dalam setiap pembangunan, selalu ada tujuan kultural yang disisipkan. Salah satu program dari undang-undang tersebut adalah melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan (Vredian, 2018). Hal ini berkaitan erat dengan cara meningkatkan sikap toleransi yang ada di masyarakat, dimana masyarakat akan dibiasakan berinteraksi dengan berbagai perbedaan yang ada dalam lingkungan multikultural, agar kita tetap bisa menjaga struktur sosial budaya yang berlaku sesuai dengan identitas bangsa. *Ketiga*, menegakkan Kode Etik Jurnalistik. Agenda ini penting karena mengingat semua hal, termasuk berbagai informasi dan berita yang sudah terdigitalisasi, maka tanggung jawab dan profesionalisme media perlu menjadi titik fokus, seperti bagaimana cara media digital menyampaikan berbagai informasi agar masyarakat digital tidak merasakan ambiguitas saat membaca dan memahami berita. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena tak jarang media pun menjadi alat untuk membela salah satu kubu yang menyebarkan populisme, sehingga perlu juga diperhatikan apa maksud dari suatu media digital dalam menyebarkan berbagai informasi. Oleh karena itu, diperlukannya optimalisasi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Pers, khususnya terhadap kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman seluruh jurnalis, kemudian memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Dalam hal ini, para anggota dan pengawas yang ada di Dewan Pers dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi, demi jurnalis yang berkualitas. *Keempat*, membuat dan menegakkan regulasi yang tegas. Dalam rangka mengurangi populisme saat ini, tentunya diperlukan pula regulasi yang tegas, adil, dan disegani semua orang. Regulasi yang dapat digunakan untuk menekan laju populisme adalah UU ITE, mengingat pergerakan mereka yang masif di dunia digital, maka sebenarnya undang-undang ini dapat dijadikan regulasi yang kuat untuk menembus celah dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh para populis, khususnya dalam penyebaran hoax dan

ujaran kebencian. Namun, seperti yang kita ketahui undang-undang ini menuai kritikan dari berbagai pihak, termasuk para pakar hukum. Hal ini karena banyak pasal-pasal 'karet' yang rumusannya tidak jelas dan cenderung multitafsir, seperti Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 UU ITE. Oleh karenanya, jangan sampai hukum hadir dengan dalih untuk melindungi, namun hadirnya pasal karet tersebut justru disalahgunakan pemerintah sebagai alat melawan masyarakat atau kubu oposisi tanpa dasar yang jelas. Hal ini relevan jika kita meninjau kembali teori efektivitas hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang perlu dipenuhi agar hukum tersebut efektif, salah satunya adalah faktor hukum itu sendiri. Tanpa adanya kekuatan hukum yang jelas, populisme akan sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, perlunya ketepatan dan ketegasan yang dituangkan dalam hukum positif di Indonesia salah satunya dengan melakukan peninjauan ulang terhadap regulasi yang ada saat ini khususnya di dalam UU ITE agar tidak ada pihak merasa dirugikan dan terlindungi dari arus populisme yang berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa.

Simpulan

Populisme merupakan salah satu taktik politis yang dalam praktiknya mudah untuk diadaptasikan dengan berbagai situasi dan kondisi. 'Tipisnya' taktik populisme menjadi keuntungan tersendiri bagi para populis yang memiliki intensi untuk memengaruhi kolektif yang dinamis dengan cara memusatkan suatu paham untuk menarik perhatian, bahkan tak segan untuk digunakan dalam menjatuhkan lawan politik, dengan memecah dan menciptakan batas di masyarakat terlebih dahulu. Situasi tersebut, menjadi sebuah ancaman besar bagi pluralisme Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi konkret berupa penegakkan strategi ataupun pembentukan payung hukum yang jelas serta tegas untuk menindak para populis yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak baik pemerintah, media, dan masyarakat untuk lebih waspada terhadap unsur-unsur pemecah belah bangsa, agar tidak menjadi korban akibat sebuah taktik manipulatif. Populisme masih dianggap sebagai suatu hal yang tidak terlalu disadari kehadirannya, bahkan tidak terlalu dihiraukan eksistensinya. Jika dibiarkan tanpa kendali penindakan tegas, taktik ini dapat mencelakai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai kesempatan dan kemungkinan. Demokrasi Pancasila serta Bhineka Tunggal Ika merupakan simbol negara dan representasi masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi tertinggi. Kedua hal tersebut merupakan elemen yang final serta mewakili identitas bangsa yang sesuai dan tidak bisa diganggu gugat oleh hal apapun.

Daftar Pustaka

- Abercrombie, N. & Longhurst, B. (1998). *Audiences: A Sociological Theory of Performance and Imagination*. London & California, UK & US : SAGE Publications Ltd.
- Andriani, D. (2020, May 20). *Kenapa Literasi di Indonesia Masih Rendah?*. Retrieved from <https://m.bisnis.com/amp/read/20200520/220/1242989/kenapa-literasi-di-indonesia-masih-rendah>
- Arya, P. (2016, December 28). *Isu Serbuan 10 Juta Pekerja China, Ini Datanya*. Retrieved from <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a56b0af949/isu-serbuan-10-juta-pekerja-cina-ini-datanya>
- Dewi, D. K. & Triandika L. S. (2020). Konstruksi Toleransi pada Akun Media Sosial Jaringan Gusdurian. *Jurnal Lentera*, 1(14), 19–39. Retrieved from <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/lentera/article/view/2159>
- Ghazali, A. M. (2019, March 3). *Harus Dihapuskan, Kata 'Kafir' Mengandung "Kekerasan Teologis"*. Retrieved from <https://www.matamatapolitik.com/polling-news-harus-dihapuskan-kata-kafir-mengandung-unsur-kekerasan-teologis/>
- Haboddin, M. (2019). Populisme, Politik Pertahanan, dan Pemimpin Lokal. *Jurnal Inovasi Ilmu*

- Sosial dan Politik*, 1(2), 173–180. doi : <http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4802>
- Hasan, A. M. (2018, November 1). *Jualan Isu Komunis & Hoaks WhatsApp, Bolsonaro Menang Pemilu Brazil*. Retrieved from <https://tirto.id/jualan-isu-komunis-hoaks-whatsapp-bolsonaro-menang-pemilu-brazil-c8U9>
- Herlina, L. (2018). Disintegrasi Sosial Dalam Konten Media Sosial Facebook. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 1(2), 232–58. doi : <https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3046>
- Lopes, B. D. (2017, July 15). *Why Is Neoliberalism Back In Latin America ?*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/opinions/2017/7/15/why-is-neoliberalism-back-in-latin-america>
- Ludwianto, B. & Fikrie, M. (2020, February 21). *Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet*. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp>
- Lukmantoro, T. (2018, June). Hoaks Serbuan TKA Dari Tiongkok : Kepanikan Moral dan Budaya Ketakutan. *LIPi : Masyarakat Indonesia (Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia)*, 44, 31-46. Retrieved from <http://jmi.ipk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/viewFile/798/533>
- Madung, O. G. (2018). Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme. *Jurnal Ledalero*, 7(17), 59–76. doi : <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v17i1.129.58-76>
- Muri D. (2017). Let The People Rule ! : Definition and Theories of Populism. *CIDOB Report*, 1(1), 9-13. Retrieved from https://www.cidob.org/en/articulos/cidob_report/n1_1/let_the_people_rule_definitions_and_theories_of_populism
- Nurita, D. & Amirullah (2019, August 4). *Ijtima Ulama PA 212: Dari Gerakan Agama, Politik, Balik ke Agama*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1231968/ijtima-ulama-pa-212-dari-gerakan-agama-politik-balik-ke-agama>
- Ritonga, A. D. & Adela, F. P. (2020). Mencermati Populisme Prabowo Sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik Pada Pemilihan Presiden 2019. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1): 1-13. doi : <https://doi.org/10.32734/politeia.v12i1.3170>
- Setu, F. (2019, May 2). *Temuan Kominfo : Hoax Paling Banyak Beredar di April 2019*. Retrieved from https://kominfo.go.id/content/detail/18440/temuan-kominfo-hoax-paling-banyak-beredar-di-april-2019/0/sorotan_media
- Subarkah, L. (2020, September 6). *Intoleransi di DIY Meningkat 5 Tahun Terakhir, Ada Motif Politik Hingga Ekonomi*. Retrieved from <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2020/09/06/510/1049119/intoleransi-di-diy%20meningkat-5-tahun-terakhir-ada-motif-politik-hingga-ekonomi>
- Traverso, E. (2019). *The New Faces of Fascism : Populism and the Far Right*. London & New York, UK & US : Verso
- Vredian, F. (2018, December 26). *“Strategi Kebudayaan” dan Harapan Baru Perlindungan Keragaman dan Ekologi*. Retrieved from <https://crs.ugm.ac.id/strategi-kebudayaan-dan-harapan-baru-perlindungan-keragaman-dan-ekologi/>
- Zahara, M. N., Wildan, D., & Komariah, S. (2020). Gerakan Hijrah : Pencarian Identitas Untuk Muslim Milenial di Era Digital. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development (IJSED)*, 2(1), 52-65. doi : <https://doi.org/10.52483/ijsed.v2i1.21>